

## KOIZUMI JUN'ICHIRO: SEBUAH AMBISI REVOLUSI

**Dihias Triananda**

*Institut Kajian Asia Timur*

---

### Abstrak

Jurnal ini mendeskripsikan tentang perjuangan Perdana Menteri Jepang dalam melaksanakan reformasi ekonomi politiknya tahun 2001-2006. Jurnal ini berjudul Koizumi Jun'ichiro: Sebuah Ambisi Revolusi. Pemilihan Umum pada April 2001 menjadi hal yang penting bagi bangsa Jepang. Masa resesi selama satu dekade atau sering disebut '*Lost Decade*' harus segera diubah dan yang menjadi harapan akan adanya perubahan secara ekonomi terletak pada hasil pemilu ini. Koizumi yang keluar sebagai pemenang dari pemilu ini memikul tanggungjawab sebagai Perdana Menteri revolusioner. Partai Perdana Menteri sendiri dan birokrasi yang didukung partainya ternyata yang menjadi penghambat dalam melaksanakan revolusinya. Selain itu terdapat perdebatan sengit diawal pemerintahannya soal yang mana harus dilaksanakan harus lebih dahulu dilaksanakan reformasi politik atau ekonomi tanpa menambah beban kepada negara. meskipun pada akhirnya rencana ini gagal akibat kehabisan waktu dalam mengurai birokrasi yang terlalu berbelit-belit namun ini tetap menjadi sebuah langkah yang belum pernah ada satupun dari Perdana Menteri pendahulunya yang berani menapaki.

Keywords: Jepang, Politik, Koizumi, Reformasi Struktural, 2001

### Abstract

This journal describes the struggles of Japan's Prime Minister in carrying out his political years 2001-2006 economic reforms. This journal titled Jun'ichiro Koizumi: a Revolutionary Ambitions. The general election in April 2001 became an important thing for the people of Japan. Times of recession for a decade or is often called a 'Lost Decade' should be modified and that the hope of change in the economy lies in the results of the election. Koizumi comes out as the winner of this election is to bear responsibility as Prime Minister. The Prime Minister's own party and bureaucracy that is supported by his own party, it turns out that hampered in carrying out its revolution. In addition, there is fierce debate at the beginning of his reign a matter which should be implemented should be first held political or economic reform without adding burden to the State. Although this plan ultimately failed due to running out of time in the break down bureaucracy is too convoluted, but this remains a step that has never been one of his predecessor Prime Minister who dared to tread.

Keywords: Japan, politics, Koizumi, structural reform, 2001

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum tahun 2001 menjadi sangat penting bagi Jepang. Sebuah asa baru dan ambisi akan Jepang yang lebih baik terbentuk. Koizumi Jun'ichi merupakan perdana menteri Jepang ke 85 yang terkenal akan ketampanannya bernama Koizumi Jun'ichi. Dia adalah seorang politisi dari partai yang paling berkuasa di Jepang, Liberal Democratic party. Koizumi berasal dari keluarga politisi, dia adalah politisi generasi ketiga di keluarganya, tampil sebagai salah satu calon Perdana Menteri yang tanpa didukung satu faksi pun. Sebuah revolusi dapat menyelamatkan negara dari kondisi terpuruk maka Koizumi yang tampil sebagai seorang revolusioner pun diharapkan mampu melaksanakan tugasnya. Tanggal 24 April 2001 Koizumi mendaki ketampuk Perdana Menteri dengan sebuah rencana reformasi yang berani demi satu tujuan, menyelamatkan ekonomi Jepang. Aktor Ekonomi Pemicu Reformasi.

Jepang mengalami suatu masa dengan pertumbuhan ekonomi sangat pesat yang dikenal dengan istilah *bubble economy*. Masa kejayaan ini berlangsung antara 1960-1989. Satu dekade setelah meletusnya bubble economy, Jepang mengalami resesi ekonomi selama dua dekade. Ditengah kondisi ekonomi Jepang yang stagnan pasca *bubble economy* tahun 1960, Jepang harus berbenah diri agar bisa tetap bersaing dalam dunia global. Tuntutan untuk reformasi harus segera dilaksanakan. Pada Desember 2001, kondisi ekonomi Jepang masih mengalami periode penyesuaian pekat dan kondisi yang parah akan terus, dengan nol pertumbuhan diproyeksikan untuk tahun fiskal 2002. Tiga bulan kemudian, Menteri negara ekonomi dan kebijakan fiskal mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi akan pindah ke sisi positifnya diparuh kedua tahun 2002. Pandangan positif ini kemudian disetujui oleh Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa bangsa berlarut-larut kemerosotan ekonomi telah dipercaya keluar, mengutip bukti pemulihan bisnis, pertumbuhan ekspor, stabilisasi harga konsumen dan tingkat pengangguran, sebagai indikator positif lainnya. Bukti kemajuan siklus diminta beberapa komentator untuk berharap bahwa meningkatkan kondisi ekonomi mungkin memecahkan beberapa masalah jangka panjang yang menimpa ekonomi Jepang. Prediksi yang ekonomi telah dipercaya keluar didukung oleh pejabat Juni 2002 angka nyata GDP pertumbuhan sebesar 1,4% pada bulan Januari Maret kuartal.) perputaran ekonomi diatribusikan kepada ' pertumbuhan yang besar di ekspor dipimpin oleh pemulihan U. S. ekonomi dan faktor eksternal lainnya (Mulgan, 2002: 11-2).

Bagaimana kelangsungan pemulihan ekonomi Jepang dibawah terpaan deflasi, ketidak stabilan sistem keuangan dan faktor negative lainnya yang menghalangi pertumbuhan Global Domestic Bruto (GDP) Jepang. Dasar kebijakan ekonomi dan manajemen kebijakan fiskal dan 2002 reformasi struktural yang dikeluarkan pemerintah Jepang menyatakan tak ada perbaikan signifikan yang terjadi dibidang ekonomi. Hal yang senada bahkan diucapkan oleh kaum yang optimis menatap masa depan ekonomi Jepang. Tidak ada jalan lain lagi selain sesegera mungkin untuk melakukan reformasi dibidang ekonomi. Memahami kemungkinan sukses atau gagalnya program reformasi ini penting untuk menilai bagaimana bangsa Jepang keluar dari resesi. Saat ini Indonesia memiliki masalah yang sama dengan Jepang masa itu, perbedaannya hanya terletak pada sebab. Indonesia resesi disebabkan oleh krisis mata uang Asia tahun 1998. Dalam konteks ini bahwa dinamika yang disebut Revolusi Koizumi tentu begitu besar.

Koizumi memakai kata Reformasi Struktural untuk menyebutkan ambisinya mengubah Jepang. Reformasi Struktural adalah sebuah konsep abstrak diajukan Koizumi sejak masa kampanyenya. Abstrak dalam pengertian tidak ada konsep tunggal dan baku yang dapat mendeskripsikan dengan jelas apa yang diinginkan sebenarnya dari Koizumi. Dalam berbagai perspektif reformasi struktural ini bisa berubah arti. Dalam pengertian

umum ini melibatkan perubahan mendasar yang memiliki efek yang mengubah karakteristik tetap sistem ekonomi, politik, sosial dan administratif. Struktur bisa berarti mekanisme dan itu hal yang tidak berubah dengan mudah (Mulgan, 2002: 3). Menurut Koizumi reformasi struktural harus berfokus pada deregulasi peraturan dan menswastakan beberapa BUMN demi efisiensi ekonomi. Di Jepang sendiri terjadi perdebatan yang alot tentang reformasi dibidang apa yang akan didahulukan apakah pemulihan ekonomi lalu reformasi dijalankan. Meskipun Koizumi bersikeras untuk melaksanakan reformasi meskipun menimbulkan “rasa sakit” pada masyarakat, reformasi tetap dilaksanakan meskipun pertumbuhan ekonomi minus.

Dalam kebijakan ekonomi, reformasi struktural berarti reformasi berorientasi pasar yang smenggerakkan ekonomi ke arah pasar yang lebih bebas dan lebih transparan dengan memperkenalkan atau memperkuat mekanisme pasar. Di lebih banyak konteks kebijakan umum, reformasi struktural mencakup tidak hanya gagasan reformasi pasar, tetapi juga pengertian pemerintah yang lebih kecil dan lebih efisien. Selain reformasi seperti deregulasi, liberalisasi perdagangan, memperkuat kebijakan persainganpasar dan restrukturisasi sektor keuangan, itu juga mencakup reformasi sektor menatap seperti privatisasi, fiskal dan reformasi pajak, dan kesejahteraan dan pensiun reformasi. Singkatnya, mengacu pada paket saling terkait kebijakan “perbaikan” bertujuan untuk lebih mengefisienkan alokasi sumber daya, produktivitas yang lebih tinggi dan peningkatan pertumbuhan prospek bagi Negara (Mulgan, 2002: 3).

Dibidang politik, Jepang terjadi ketidakefisienan birokrasi akibat maraknya praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Segitiga besi yang selalu menjadi momok bagi pemerintahan akibat kuatnya pengaruh mantan politisi yang menjadi petinggi di perusahaan setelah mundur dari dunia politik. Segitiga besi digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan dan membedakan antara undang-undang, birokrasi, dan bisnis besar yang merupakan struktur salingmendukung dan saling hubungan antara mereka. Implikasi dari segitiga besi adalah bahwa hal itu menciptakan ekosistem bagi aktor yang sistematis berkolusi dengan satu sama lain dan menghalangi upaya untuk mendorong reformasi atau mengejar perubahan yang mengancam kepentingan mereka. Ini berarti bahwa kebijakanmemiliki rasa kekakuan dan ketahanan yang membuatnya sulit untuk aktor di luar segitiga untuk mengubah dan mengubahnya. Dan juga membentuk hubungan saling untuk mengartikulasikan, mendukung dan mencegah minat mereka sedang didominasi.

Terjadi pengkotak-kotakan dalam tubuh LDP, fenomena politik ini disebut faksi, kelompok yang menjadi poros penggerak partai. Kelompok-kelompok ini menjadi nafas sekaligus penghalang bagi partai. Seringnya terjadi persaingan antara sesama faksi LDP menjadi masalah tersendiri bagi Koizumi yang didukung oleh faksi-faksi kecil. Jumlah faksi partai selalu berubah-ubah, biasanya ketika sang ketua faksi terjerat kasus korupsi faksi ini bubar karena nama faksi biasanya mengikuti nama ketua faksi. Dari jajaran ketua-ketua faksi ambil beberapa nama untuk menjadi kandidat ketua partai. Seperti Hashimoto Ryutaro (Kompas, edisi 17 April 2001) yang menjadi rival Koizumi dipemilu 2001. Hashimoto memiliki faksi sendiri yang mana merupakan faksi terbesar saat itu. Faksi-faksi besar bersikap konservatif dan faksi-faksi kecil condong kearah progresif.

Praktek birokrat yang membantu ke peran dalam industri mereka telah menghabiskan karier mereka mengatur disebut *amakudara* (天下り: keturunan dari surga), dan itu adalah praktik yang akrab bagi siapa saja yang telah mempelajari struktur pemerintah Jepang pascaperang. yang terhubung Partai Demokrat Liberal,<sup>1</sup> birokrasi, dan perusahaan-perusahaan Jepang dalam hubungan erat Berikat kepentingan bersama. Birokrat yang setia melayani kepentingan LDP selama karir pegawai mereka diberi ganjaran dengan mem-

bayar tinggi peran perusahaan setelah pensiun; pada gilirannya, mereka menyediakan perusahaan dengan akses ke jaringan berharga kontak dan saluran belakang ke dalam pelayanan mereka mantan. Tapi itu kemudian dan ini sekarang. Salah satu aspek yang kurang dilaporkan dari transformasi politik yang Jepang telah melalui karena pergantian abad penurunan cepat amakudarisystem, yang diletakkan di bawah tekanan besar oleh serangkaian reformasi formal dan informal dari awal 2000-an dan seterusnya, berpuncak pada undang-undang yang membuat terang-terangan ilegal pada tahun 2007. Karena pertumbuhan ekonomi tersandung, segitiga besi berkarat dan hancur (Rob Fahet, <https://japan-forward.com/the-end-of-the-iron-triangle-and-what-it-means-for-japanese-politics> diakses pada tanggal 7 Oktober 2017).

*Amakudari* adalah salah satu cara kunci yang mana merupakan kebijakan LDP atau aktivitas birokrasi, sehingga memastikan bahwa mereka bertindak dalam kepentingan terbaik partai. Dipermukaan, Jepang birokrat sangat kuat karena mereka berdua mengeluarkan dan menerapkan undang-undang. Tanpa beberapa metode kebijakan kegiatan itu, LDP bisa tidak yakin bahwa birokrat akan menulis undang-undang yang sesuai dengan pemilihan mereka. Dengan ujung Segitiga besi, *amakudari* menjadi sebagai sesuatu yang agak lebih menyeramkan. Dengan perusahaan bertindak dalam kompetisi dan bukan dalam konser terpusat, sistem mendorong Pensiun PNS ke baik pekerjaan yang dibayar pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang mereka itu dimaksudkan untuk dapat mengatur adalah sumur potensi korupsi. LDP pemimpin dari Perdana Menteri Koizumi Jun'ichiro dan seterusnya, meskipun tertarik untuk menjaga hubungan LDP sendiri untuk industri, melihat hubungan nyaman yang berkelanjutan antara birokrasi dan dunia usaha sebagai masalah harus ditangani. Birokrat sendiri telah mengambil kontrol dari mekanisme awalnya dirancang untuk menjaga mereka dalam antrean. Langsung mempertahankan hubungan semacam ini dengan perusahaan, birokrat menciptakan kekuatan saluran yang dilewati kepemimpinan politik (LDP atau sebaliknya) sepenuhnya (Rob Fahet, <https://japan-forward.com/the-end-of-the-iron-triangle-and-what-it-means-for-japanese-politics> diakses pada tanggal 7 Oktober 2017).

Koizumi Jun'ichiro dikenal sebagai salah satu pemimpin muda LDP yang sangat menjanjikan di pertengahan tahun 1990an. Dia salah satu dari anggota YKK yang merupakan akronim dari Yamasaki, Kato dan Koizumi, dimana Koizumi merupakan anggota termuda. Dia lahir di Kanagawa sebelah selatan Tokyo pada tanggal 8 Januari 1942. Pertama kali masuk ke parlemen pada pemilu 1972 sebagai perwakilan Kanagawa di Majelis Rendah. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan tahun 1988-1989, berasal dari faksi Fukuda, dimana dia dianggap berbeda dari politisi sayap kanan-tengah LDP (Stockwin, 2005: 191).

Koizumi Jun'ichiro, Perdana Menteri (PM) sekaligus ketua partai yang paling berkuasa di Jepang, Liberal Demokrasi Party (LDP) antara tahun 2000-2005 adalah figur politik kharismatik yang pernah Jepang miliki sampai saat ini. Perdana Menteri populer ini mendaki puncak kekuasaan tertinggi di Jepang melalui Pemilihan Ketua Umum LDP pada tanggal 24 April 2001. Koizumi menjadi Perdana Menteri menggantikan Yoshiro Mori, Perdana Menteri Jepang ke 85 (5 April 2000-26 April 2001) Dengan mengalahkan 3 pesaing lainnya yaitu Ryutaro Hashimoto, Shizuka Kamei, dan Taro Aso. Melalui pemilihan satu putaran, mantan Menteri Kesehatan ini menang telak dalam pemilihan ketua umum LDP dengan perolehan suara sebesar 74% dari total suara di parlemen sebesar 484 suara atau sebesar 298 suara. Naiknya Koizumi menjadi ketua partai sekaligus Perdana Menteri bisa disebut "Kiseki" pasalnya di kubu Hashimoto, memiliki seorang penasihat politik berjudul "The Kingmaker" bukan hanya itu sebagian besar suara anggota LDP di parlemen (346

suara) berpihak kepadanya.

Koizumi sejak awal dikenal sebagai figur yang populer di mata rakyat dan dimata anggota LDP di 47 provinsi di Jepang. Diperkirakan ia akan mengantongi banyak suara di pemilihan putaran pertama sementara Hashimoto akan mendapatkan sebagian besar suara dalam pemilihan putaran kedua. Pada pemilihan 2 (dua) putaran yang semula ingin digunakan yaitu pemilihan putaran pertama hanyalah sebatas penjajakan suara semata akhirnya berubah menjadi hal yang menentukan. Ditengah jalan skenario berubah. Koizumi memperoleh kemenangan telak atas rivalnya dan gagasan baru pun dikembangkan isinya menyatakan bahwa karena suara pemilihan pertama adalah suara wakil-wakil LDP dari seluruh provinsi di Jepang, maka suara ini adalah suara yang mewakili seluruh aspirasi anggota-anggota LDP diseluruh negeri.

Meskipun Hashimoto bersikeras untuk melakukan pemilihan dua putaran hal ini urung dia lakukan demi menjaga reputasi LDP yang sudah buruk dimata rakyat. Hal ini terbukti pada pemilihan Majelis Tinggi yang lalu dimana LDP kehilangan suara dalam jumlah besar, maka dinilai apabila Hashimoto tidak mengindahkan suara dalam pemilihan putaran ini dapat mengakibatkan LDP akan semakin terperosok kejurang kehancuran atau lebih buruk lagi kehilangan anggota.

Junichiro Koizumi menjabat sebagai Menteri Kesehatan dalam kabinet bentukan Hashimoto. Terlahir dalam keluarga politisi, Kakeknya, Katajiro Koizumi seorang pengusaha yang akhirnya terjun dalam dunia politik sebelum zaman perang. Ayahnya, Junya Koizumi, seorang kepala Dinas Pertahanan pada tahun 1960an. Rambut gonrong dan kegemarannya mendengar music rock menjadikannya alien bagi politisi Jepang. Dengan wajah tampan, gaya slengean dan kepribadian yang easy-going menjadikannya sosok kharismatik, hal yang membuatnya dengan mudah menarik simpati rakyat.

Setelah menandatangani Perjanjian Postdam pada bulan Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada Pasukan Sekutu. Hasil dari perjanjian ini adalah Jepang diduduki oleh Pasukan Sekutu selama hampir 7 tahun lamanya. Selama pendudukan, Pasukan Sekutu menjalankan program demiliterisasi dan demokratisasi Jepang. Perubahan paling mencolok dimasa ini merupakan ciri tersendiri dari era ini adalah perubahan konstitusi Jepang yang semula memakai Konstitusi Meiji kemudian digantikan dengan Konstitusi yang dibuat oleh Pasukan Sekutu dibawah pengawasan ketat jendral Douglas McArthur, komandan tertinggi SCAP (pasukan Pendudukan Jepang atas sekutu), yang rancangan konstitusinya menggunakan tata cara amandemen yang tertuang pada pasal 73 Konstitusi Meiji. Naskah konstitusi yang baru menitikberatkan tiga prinsip utama yaitu, pertama kekuasaan berada ditangan rakyat dan Kaisar merupakan symbol penyatu bangsa, kedamaian (heiwa), menghargai hak asasi manusia. Konstitusi membagi pemerintahan kedalam tiga wilayah administrasi atau yuridiksi yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kokkai (Kishimoto Koichi, 1997: 7) (Nasional Diet/Parlemen) adalah lembaga negara tertinggi dan lembaga tunggal pembuat undang-undang, fungsi eksekutif berada ditangan kabinet parlementer, yudikatif berada ditangan Mahkamah Agung (Stockwin, 2005: 155-156).

### *Diet*

Parlemen Jepang atau Diet Nasional (国会, Kokkai). adalah lembaga legislatif pemerintahan Jepang. menurut Konstitusi Jepang, Diet merupakan "badan negara tertinggi Jepang" dan "lembaga tunggal pembuat undang-undang". Diet terdiri dari dua kamar atau bikameral yaitu Majelis Rendah (衆議院, Shugiin) dan Majelis Tinggi (参議院, Sangiin). Diet Kekaisaran (帝国議会, Teikoku Gikai, adalah parlemen dibawah konstitusi Meiji ta-

hun 1898) pendahulu langsung dari Diet yang sekarang, dibentuk tahun 1890 melalui ketetapan Konstitusi Kekaisaran Jepang tahun 1889 dan terdiri atas Majelis Rekanan (貴族院, Kizokuin) dan sebuah Majelis Rendah. terdapat dua faktor yang membuat Diet Kekaisaran lemah secara konstitusi, pertama, kekuasaan legislatif berada ditangan Kaisar. kedua, karena kabinet bertanggungjawab langsung kepada Kaisar bukannya ke parlemen. Suara Majelis Rendah saat itu hanya terbatas pada kalangan tertentu saja. yang dapat mewakili dan terpilih untuk duduk di Majelis Rendah saat itu hanya kalangan konlomerat yang membayar pajak 15 yen<sup>2</sup> pertahun saja, harga yang cukup fantastis saat itu. ketentuan ini berubah semenjak *Universal Manhood Suffrage Law*<sup>3</sup> dikeluarkan tahun 1925 yang mengatur semua laki-laki berumur 25 tahun keatas memiliki hak memilih dan dipilih dalam legislatif. perubahan Diet ke bentuk yang sekarang terjadi setelah Perang. konstitusi baru yang menjadikan Diet sebagai Lembaga legislatif tertinggi. sistem bikameral dipertahankan atas desakan pemerintah. dahulu House of Councillor bernama House of Peers dengan 252 anggota yang merupakan bekas samurai. Perdana Menteri dan menteri kabinetnya merupakan anggota parlemen dan dalam menjalankan tugas eksekutifnya bertanggungjawab kepada Diet. dalam konstitusi yang baru, Majelis Rendah dan Majelis Tinggi berbagai kekuasaan legislative (*Japan: Profile of A Nation*, 1994).

Diantara kedua majelis ini hanya Majelis Rendah yang memiliki keuntungan lebih karena Perdana menteri dipilih dari anggota Majelis Rendah. Majelis rendah memiliki masa tugas sampai 4 tahun kecuali dibubarkan oleh Perdana Menteri, seperti yang telah dilakukan oleh Koizumi ketika rencananya untuk mereformasi perusahaan Pos Jepang gagal. Dikonstitusi juga mengatur bahwa keputusan majelis rendah merupakan keputusan Diet. Dalam penetapan anggaran belanja misalnya, bila majelis tinggi gagal mengambil keputusan maka majelis rendah yang akan menetapkan. Semua perjanjian-perjanjian internasional yang diajukan ke kedua majelis, majelis rendah dapat mengambil keputusan yang sebaliknya dari yang diajukan majelis rendah apabila dalam 30 hari majelis rendah dan komite gabungan menemui jalan buntu. Meskipun kedua majelis ini berbagi kuasa legislatif, dalam banyak kasus majelis rendah dapat dengan mudah mengambil alih kuasa penuh atas legislatif.

### **Liberal Democratic Party**

Partai yang mengusung Koizumi adalah LDP. Liberal Democratic Party (自由民主党, Jiyuu Minshuto) merupakan partai yang berdiri pada bulan November 1955. Partai gabungan dua partai besar ini Democratic Party dan Liberal Party terus berkuasa selama 38 tahun. Bergabungnya dua partai konservatif besar ini bertujuan untuk menghalangi JSP (日本社会党, Japan Socialist Party) berkuasa. Pergantian aliansi antar faksi merupakan hal lumrah dalam tubuh LDP sendiri. Pergantian aliansi ini membuat partai dengan mudah beralih ke haluan kiri atau kanan dalam sayap konservatif. Kemampuan bermanuver ini membuat LDP sangat fleksibel atau lebih dikenal dengan nama "Pendulum Efek" yang nantinya berkembang sampai pada pengambilan kebijakan. Ciri khas dari partai ini dijabarkan dengan sangat umum yaitu nasional, demokratis, damai, parlementer, progresif dan kemakmuran. Sudah menjadi rahasia umum bahwa LDP merupakan partai yang korup namun, partai tetap berkuasa sampai sekarang karena adanya koenkai yang bersifat kedaerahan dan personal. Pada setiap pemilihan partai tidak mengutamakan lembaganya tetapi pada setiap calon legislatif dari partainya, maka dari itu partai ini tetap bisa berkuasa meskipun seringkali diterpa isu korupsi (Stockwin, 2005: 204-208).

### **Faksi (派閥, Habatsu)**

Ciri unik dari partai politik Jepang adalah adanya kelompok-kelompok kecil dalam partai. Bahkan, bisa dibilang partai politik Jepang ini merupakan gabungan beberapa kelompok-kelompok kecil ini yaitu faksi. Faksi ini mungkin terdapat disetiap partai yang tersebar diseluruh dunia. Konsep faksi yang dimiliki Jepang berpusat pada ide boss-anak buah. Dalam bahasa Jepang istilah ini disebut *oyabun-kobun*, *oyabun* merupakan bossnya atau semacam godfather bila dipadankan dengan mafia sisilia dan *kobun* merupakan bawahan atau anak buah. Fenomena sosial politik ini sangat erat kaitannya dengan kultur berkumpul masyarakat Jepang. Faksi Jepang seringkali bertingkah laku sesuai kepentingan dan seringkali berbeda dengan tujuan sebenarnya. Beberapa faksi yang ada di Jepang memiliki silsilah yang terbentang selama beberapa dekade, sehingga bukan hal yang mengherankan bahwa terdapat faksi yang lebih lama ketimbang partainya. Dengan kelompok-kelompok kecil atau dengan memecah-pecah partai menjadi faksi-faksi akan lebih mudah untuk menjaga keutuhanorganisasi ketimbang menjaga keutuhan sebuah organisasi sebesar partai politik. Jadi bila dipikirkan kembali pernyataan Stockwin terkait faksi partai politik Jepang, adalah hal benar bahwa faksi bukanlah kondisi budaya tetapi lebih kepada adaptasi politik untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan politis orang-perorangan.

Faksi yang ada disetiap partai berbeda-beda, namun dalam tulisan ini hanya akan menggambarkan bagaimana faksi dalam LDP, partai Junichiro Koizumi bekerja. Sebuah sistem berkembang di dalam tubuh LDP sendiri dimana faksi menjadi bagian tak-terpisahkan dari seleksi kandidat yang bakal maju dalam setiap pemilu, pembagian dana, kampanye pemilu dan pembagian jabatan. Setiap faksi mendukung kandidatnya dibanyak pemilihan. Tidak jarang faksi-faksi ini bersaing dengan sesama faksi LDP dalam satu daerah pemilihan seperti yang terjadi pada masa pemilihan multi-member constituencies. Faksi mengumpulkan dana dan mendistribusikannya pada kandidatnya dikampanye pemilunya. Ketua faksi ikut berkampanye mewakili anggotanya yang ikut dalam pemilihan. Selain itu faksi-faksi ini juga yang melakukan tawar-menawar jabatan dikabinet atau partai dengan ketua LDP. Ciri lain dari faksi LDP yaitu adanya aliansi dengan faksi lainnya. Tidak jarang faksi dari LDP bersekutu dengan faksi dari partai lain, misalnya dari faksi dari partai Komeito. Sisi lain dari aliansi tentu saja rivalitas, rivalitas antara sesama faksi LDP sering terjadi antara faksi sayap kanan dengan faksi sayap kiri.

Faksi-faksi LDP telah berhasil melalui berbagai tahapan adaptasi. Tidak lama setelah partai terbentuk pada tahun 1955, banyak faksi yang terbentuk dan mempunyai peran penting dalam tugas-tugas kepartaian. Faksi-faksi awal LDP dipimpin oleh orang-orang yang dulunya berada di partai-partai konservatif besar. Meskipun faksionalisme LDP tidak mengutamakan faksi kebijakan. Faksi dengan agenda politis cenderung terpinggirkan, sedangkan faksi utama cenderung tidak ingin terlalu mencolok dalam keterlibatannya dalam setiap kebijakan. Seiring berjalannya waktu faksi malah kian meninggalkan sistem hirarki yang menjadi ciri dari kebudayaan masyarakat Jepang. Pergerakan berkaitan dengan keberlangsungan eksistensi faksi itu sendiri, dimana hal ini akibat dari diperketatnya aturan terkait pendanaan partai. Sehingga mereka yang memiliki *previlage* dibidang dana dapat melesat dengan cepat dan juga mereka sangat mengerti bahwa kharisma seseorang sangat dibutuhkan oleh faksi demi terciptanya citra yang baik. Tahun 1994 terjadi sebuah reformasi pemilu dimana sistem pemilihan banyak anggota dihapuskan. Banyak yang mengira bahwa sistem faksi partai akan hilang tetapi yang terjadi malah sebaliknya, faksi tetap bertahan dan malah membuat mereka makin mudah beradaptasi dengan sistem baru tersebut (Stockwin, 2005: 121-122).

Mustahil membahas LDP dan dinamikanya tanpa membahas tindak-tanduk faksi.

Secara esensial LDP merupakan gabungan faksi-faksi yang mana bagian yang lebih besar dari partai dikerjakan oleh faksi. Yang lebih penting, faksi memainkan peran penting dalam pada pemilihan anggota petinggi partai seperti pemilihan ketua partai, penunjukan menteri kabinet, dan penunjukan pejabat penting partai. Keuntungan memperoleh posisi penting dalam pemerintahan dan partai sangat bergantung pada kursi parlemen yang didapatkan faksi partai. Dihadapan faksi LDP kemampuan para calon tidak memiliki pengaruh yang besar jika tidak dibarengi dengan pengaruh politik yang besar tidak akan membantu dalam mendapatkan tempat untuk mengisi pos-pos penting baik dipemerintahan maupun birokrasi. Pada tahapan tertentu faksi LDP membentuk sebuah mekanisme partai tersendiri dan menjadi darah-daging dari partai. Faksi-faksi ini bahkan memiliki kantor sendiri yang terpisah dari sekretariat partai dan mengadakan rapat-rapat tersendiri secara berkala, sehingga banyak para ahli politik Jepang berpendapat kalau faksi merupakan partai dalam partai.

Faksi LDP tidak selamanya terpecah oleh perbedaan ideology dan kebijakan. Bagaimana pun juga faksi adalah alat untuk memperjuangkan kuasa politik dan tujuan utama pembentukannya adalah untuk membangun ikatan personal, untuk mengembangkan karir kepemimpinan dan pengikut, untuk menggalang dana untuk aktivitas politik dan menyediakan organisasi pendukung bagi kampanye pemilu Jepang. Disemua faksi orang dengan kemampuan duduk dikursi perdana menteri atau memegang jabatan penting dibirokrasi biasanya diangkat menjadi ketua faksi. Orang-orang ini biasanya berkharisma kuat yang membantunya mencapai kekuasaan.

Munculnya faksi merupakan bagian dari permainan politik pemilu presidensial. Tetapi mengapa mereka memainkan peran penting dalam politik konservatif Jepang? Mengapa mereka bisa beradaptasi padahal tidak sedikit yang menginginkan memberangus perkumpulan ini, termasuk Koizumi. Toh pada akhirnya mereka bertahan dan terus beradaptasi.

Sudah menjadi kultus masyarakat Jepang untuk berkumpul, mereka suka membentuk sebuah kelompok-kelompok semiorganisasi berukuran kecil sampai menengah, mulai dari kelompok dagang, kelompok yang memiliki pekerjaan sama sampai kelompok mafia. Sehingga faksi merupakan perwujudan sosio-politik yang lumrah bagi Jepang, hal yang jarang dimengerti oleh Orang Barat. Hal lain yang menjadi alasan dibalik terbentuknya faksi, menurut para ahli politik Jepang, mereka muncul dalam hubungan antara pertarungan memperebutkan kendali atas posisi ketua partai dan pemerintahan Jepang. Sudah menjadi rahasia umum kalau dalam setiap pemilihan ketua LDP, dana yang mengalir tidak sedikit. Belum lagi dana yang dikucurkan untuk pemilu parlemen. Hal-hal ini yang membuat faksi-faksi ini dekat dengan korporasi-korporasi yang juga memiliki andil besar dalam pembentukan Segitiga Besi. Akibat "hutang" ini kepentingan-kepentingan negara akhir tersandera oleh kepentingan-kepentingan korporasi, hubungan inilah yang ingin diputuskan Koizumi kelak. Efek lain dari kedekatan faksi LDP dengan korporasi adalah politik uang yang menajadi citra buruk bagi LDP.

### **Perdana Menteri**

Pada pasal 65 Konstitusi 1946, tertera bahwa kekuasaan eksekutif berada ditangan kabinet yang terdiri dari ketua kabinet yaitu perdana menteri dan menteri yang lainnya diatur sesuai undang-undang. Perdana menteri yang diatur lebih jauh pada pasal 67 mengatakan bahwa perdana dipilih melalui aklamasi dari anggota Diet sesuai kesepakatan Diet sendiri. Keputusan majelis rendah dapat melampaui keputusan majelis tinggi sehingga dalam dalam pemilihan perdana menteri keputusan majelis rendahlah yang paling berpengaruh,

hal ini membuat sampai sekarang hanya tidak ada satupun anggota majelis tinggi yang menjadi perdana menteri. Dalam pasal 68 perdana menteri ditugaskan untuk menunjuk menteri dalam negeri yang selanjutnya akan membentuk menteri kabinet yang anggota mayoritasnya berasal dari parlemen sendiri. Selain menunjuk menteri dalam negeri, pada pasal ini juga perdana menteri berhak membubarkan menteri dalam negeri yang mana juga berarti membubarkan kabinet. Calon perdana menteri dipilih oleh setiap majelis dalam sidang pleno terpisah. Suara terbanyak dibutuhkan di tiap majelis agar calon dapat terpilih menjadi perdana menteri. Jika tidak mencapai mayoritas  $\frac{3}{4} + 1$  suara maka pemilihan putaran kedua dilaksanakan dengan dua calon dengan perolehan suara terbanyak. Bila masing-masing majelis mengajukan calon yang berbeda maka majelis rendah memiliki semacam "privilege" tersendiri dimana calon dari majelis rendahlah yang maju dalam pemilihan perdana menteri. Dengan adanya peraturan calon perdana menteri harus mendapat suara terbanyak di kedua majelis, maka penting bagi LDP untuk memperoleh kursi terbanyak di kedua majelis. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketua partai yang berkuasa akan menjadi perdanan menteri, begitupun sebaliknya.

Tampilnya Koizumi sebagai Ketua LDP yang akan menjadi Perdana Menteri pada tanggal 24 April 2001. Hal ini mengisyartakan bahwa Jepang harus berubah reformasi atas keamanan sistem yang sarat akan konservatisme dan tradisionalisme. Janji Koizumi untuk mereformasi secara lengkap dan menyeluruh baik terhadap LDP maupun Jepang menjadi salah satu faktor penentu kemenangan Koizumi. faktor penentu lainnya adalah janji masa kampanye untuk menampilkan kepemimpinan yang mencerminkan aspirasi rakyat dan janjinya untuk membentuk LDP yang sesuai dengan harapan rakyat. Pernyataan ini seperti mengiyakan segala praktek Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) bahkan seks yang pernah menimpa partainya. Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk mencapai puncak kekuasaan tertinggi di Jepang Koizumi memakai tangga nepotisme untuk sampai.

Meskipun kecenderungan kemenangan berada ditangan Hashimoto, bukan berarti ini mutlak. Pasalnya, 102 suara yang dimiliki faksi Hashimoto di parlemen merupakan yang terbesar dalam partai. Faksi Horiuchi yang memiliki 42 suara memastikan suaranya berada pada Hashimoto. 144 suara sudah dipastikan berada ditangan Hashimoto. Dua faksi dari pendukung Taro Aso yaitu Faksi Kono sebesar 12 suara dan Faksi Koumoto sebesar 13 suara jika tidak ada satupun calon yang sanggup memenuhi persyaratan setengah tambah 1 dari keseluruhan suara pemilih. Sampai tahap ini Hashimoto sudah memegang 169 suara. Bila ditambahkan dengan jumlah suara dari Eto-Kamei (calon terakhir) bila juga berada pada syarat diatas tidak terpenuhi maka Hashimoto, sang petahana, akan mengantongi 224 suara dari total suara anggota LDP di parlemen. Koizumi jelas tidak memiliki kesempatan untuk menang. Atas aturan pemilihan satu putaran, Kamei dan Aso memberikan suaranya pada Koizumi alih-alih Hashimoto saat melihat Koizumi unggul jauh atas Hashimoto.

Selayak yang terjadi paska pemilihan umum dan dilantiknya menjadi perdana menteri. Maka janji-janji politik saat kampanye pun ditagih. Reformasi struktural pun dilaksanakan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Jepang. Persoalan pemutusan Iron Triangle (segitiga besi) dan Amidakuri (duduknya mantan pejabat negara pada perusahaan swasta dan menjadi cantolan perusahaan ke pemerintah) masih menggerogoti birokrasi Jepang. Belum lagi berbelit-belitnya sistem birokrasi yang dianggap sebagai penghambat para peolitis untuk melakukan lobi-lobi diplomasi juga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus Koizumi selesaikan. Disamping itu yang tidak kalah peliknya adalah perekonomian Jepang yang terus terus terpuruk

Masalah ekonomi yang dihadapi oleh Koizumi tidaklah sederhana. Pemerintah

Jepang saat itu terlilit utang sebesar 660 trilyun yen, sementara bank-bank Jepang memiliki kredit macet sekitar 130-180 trilyun yen. Masalah ini diperparah oleh resesi ekonomi yang berkepanjangan dan deflasi mata uang. Belakangan muncul pertanyaan, bagaimanakah Koizumi melaksanakan reformasinya? Apakah harus dilakukan walaupun kondisi ekonomi masih sakit atau sebaliknya.

Reformasi Struktural (Seiji Kaikaku) yang digadang Koizumi memiliki dua poin penting yaitu deregulasi undang-undang dan privatisasi badan-badan usaha milik pemerintah yang dianggap tidak efisien (paling kontroversial adalah privatisasi pelayanan pos). Koizumi sangat tegas untuk mewujudkan citai-citanya. Meskipun menteri ekonomi saat itu, Taro Aso telah mengingatkan bahwa reformasinya akan menimbulkan rasa sakit bagi rakyat Jepang. Dia tetap menjalankan reformasi meski pertumbuhan ekonomi minus. Alasan Aso cukup logis, jika reformasi yang tujuannya untuk memulihkan ekonomi Jepang malah memperparah situasi ekonomi dan malah menambah beban rakyat makan reformasi ini kehilangan maknanya. Bagi Aso idelanya, reformasi dan perbaikan ekonomi berjalan berdampingan namun tentu bukan hal yang mudah. Kamei berpendapat lain, untuk reformasi yang akan dijalankan. Pemulihan ekonomi harus berjalan lebih dulu, saat perekonomian stabil dengan pertumbuhan ekonomi pertahunnya 3-4% barulah reformasi bisa dilaksanakan. Untuk itu Kamei mengusulkan penurunan pajak selama sekitar tiga tahun untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Hashimoto juga menyerukan reformasi yang tidak jauh berbeda dengan reformasi yang dimiliki Koizumi namun, tidak ada yang menyebutkan dengan pasti bagaimana bentuk sebenarnya dari reformasi yang akan dilaksanakan.

Tahun tanggal 27 Agustus 2005 era baru politik Jepang dimulai. Wajah-wajah baru dan kampanye bergaya Barat mendominasi televisi Jepang. Selain tokoh muda, Koizumi juga memasukkan tokoh wanita dalam persaingan pada pemilu 11 September 2005. Koizumi telah berhasil melakukan dua hal yang sebelumnya dianggap banyak orang mustahil dilakukannya yaitu Koizumi menyerukan pemilu lebih awal dan membuat calon muda bertarung melawan pemberontak (Reed, Seperti yang dikutip oleh Harian Kompas 27 Agustus 2005). Politikus muda lebih menerima reformasi ekonomi yang diusungnya. Selain itu, LDP juga mendapat dukungan dari Partai Komeito Baru yang mendukung usulan reformasi struktural. Namun untuk mewujudkan aliansi antara LDP dan Komeito baru, Koizumi harus membatalkan kunjungannya ke Kuil Yasukuni. Hal ini tidak disukai oleh Komeito Baru karena menuai kecaman dari negara-negara di Asia.

Pemilihan umum tanggal 11 september 2005 banyak menarik perhatian dunia internasional. Pasalnya ada 2 faktor penting yang menarik untuk dicermati. Pertama, secara ekonomi, hasil dari pemilu ini menentukan nasib dari reformasi struktural Koizumi. Kedua, dari segi politik, ini adalah pertempuran penentuan antara Koizumi sebagai pengusung reformasi dan kubu yang menentang reformasi. Tapi bagi Koizumi sendiri ini, pemilu ini merupakan ujian untuk menentukan sejauh mana popularitasnya dapat bekerja pada ruwetnya benang kepentingan dalam tubuh sistem ekonomi politik Jepang yang telah mapan selama kurang lebih 50 tahun. Koizumi membubarkan Majelis Rendah pada tanggal 8 Agustus dan mempercepat pemilu setelah gagal dalam memperoleh dukungan untuk membagi perusahaan Pos Jepang dalam empat perusahaan swasta dengan dalih demi efisiensi perusahaan Pos Jepang setelah dianggap stagnan sejak tahun 1980an.

Reformasi Koizumi merangkul segala dimensi. Diawal pidato politiknya di parlemen pada bulan Mei 2001, dia mengulang-ulang janjinya untuk segera melaksanakan reformasi struktural dibidang ekonomi, keuangan, administratif, dan social-politik. Reformasi yang terlalu melebar mencakup hampir segala bidang, sehingga berkesan abstrak. Banyak lawan politik Koizumi menentangnya dengan mencoba menggambar bentuk reformasinya

sendiri tetapi tetapi tidak ada satu yang dapat menjabar paket kebijakan apa yang harus dijalankan pemerintah saat itu. Dibidang ekonomi, Koizumi meluncurkan kebijakan reformasi berorientasi pasar, yang mana mendorong ekonomi kearah pasar bebas dengan memperkenalkan dan memperkuat mekanisme pasar yang baru. Kebijakan yang dikeluarkan untuk mengubah mekanisme pasar seperti, deregulasi aturan dagang, liberalisasi dagang, memperkuat persaingan pasar dan membangun ulang sektor keuangan. Selain itu terdapat juga beberapa Badan Usaha Milik Negara yang di swastakan demi efisiensi dan pengurangan beban APBN, reformasi pajak dan keuangan, reformasi kekayaan dan tunjangan pensiun.

Pada bulan juli 2002, Koizumi menawarkan rancangan reformasinya kepada menteri-menteri ekonominya. Rancangan perombakan ini terkait perombakan regulasi, privatisasi, outsourcing dan inisiasi lembaga keuangan swasta dari sudut pandang perpindahan tanggung jawab dari pemerintah ke swasta. Lebih spesifik lagi, pembentukan BUMD dan pengubahan undang-undang tenaga kerja, menekankan kebijakan proyek non-infrastruktur publik, meninjau ulang keterlibatan pusat pemerintahan melalui subsidi.

Untuk administrasi pemerintahan, ide untuk membuat pemerintahan yang lebih kecil dan efisien dengan deregulasi undang-undang birokrasi. Dengan ini, birokrasi yang super power melemah. Pemutusan Segitiga Besi dan Amakudari juga bagian dari pelemahan birokrasi ini. Segitiga Besi dan Amakudari ini, bagi Koizumi, dianggap sebagai sistem yang menggerogoti Jepang dari dalam, keberadaan Segitiga Besi dan Amakudari membentuk birokrasi yang kaku dan lambat sehingga cost untuk operasional meningkat dan maraknya praktek korupsi.

Koizumi saat itu dianggap sebagai orang yang mampu melaksanakan reformasi karena telah lama menjabat sebagai anggota parlemen dan sebagai menteri kesehatan sekali. Dengan ini dia pastinya memiliki pengaruh yang lebih kuat untuk menjalankan kepentingan-kepentingan Negara. Perdana menteri menggalakkan kebijakan-kebijakan seperti deregulasi (Kisei Kanwa), reformasi administrasi (gyousei Kaikaku), privatisasi (Mineika), internasionalisasi (kokusaika), liberalisasi pasar (shijo jiyuuka) yang mana menurut Koizumi lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan nasional saat itu. Kebijakan-kebijakan ini dijalankan sebagai respon atas berbagai tekanan yang dihadapi Jepang termasuk tekanan fiscal dan internasional. Perdana menteri juga mengarahkan tuntutan kepada orang-orang berpengaruh kuat dalam birokrasi Jepang. Langkah ini diambil untuk melemahkan figur-figur ini untuk memperkuat posisi Perdana Menteri sendiri dalam pemerintahan.

Beberapa perdana menteri sebelum koizumi juga mencoba melakukan perubahan di era pemerintahannya, namun yang membedakan koizumi dari para pendahulunya adalah sifat dan signifikansi program reformasinya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya reformasi Koizumi mencakup banyak aspek, dan memang demikianlah problematika yang dihadapi oleh Jepang saat itu. Alhasil Koizumi meluncurkan sejumlah besar terobosan dalam reformasi strukturalnya. Dia berusaha menjangkau banyak bidang sekaligus dan dapat menyentuh beberapa akar permasalahan dari struktur ekonomi Jepang<sup>4</sup>. Akar-akar permasalahan ini seperti, lembaga perbankan dan kredit macet, defisit keuangan dan pemborosan anggaran, penggembungan sektor perusahaan publik dan sistem kesejahteraan dan tunjangan pension yang tidak memadai dengan usia tua Jepang.

Yang kedua, untuk mencapai target pembaharuannya perhatiannya harus tertuju pada kepentingan yang bersemayam pada partainya sendiri dan birokrasi yang dibentuk oleh partainya sendiri yang membutuhkan penanganan khusus. Koizumi membidik beberapa kelompok tertentu yang berkepentingan dalam projek infrastruktur, penyediaan pos dan pelayanan medis. Menurut pandangan Koizumi, disektor-sektor inilah banyak terjadi

inefisiensi anggaran atau dengan kata lain terjadi korupsi didalamnya.

Tujuan-tujuan yang terkandung dalam reformasi struktural, yang harus segera dicapai Koizumi adalah:

1. Privatisasi perusahaan POS.
2. Menghapuskan bank-bank yang tak memberi pinjaman.
3. Perombakan perpajakan, pelayanan medis, dan tunjangan hari raya.
4. Pengurangan pemborosan anggaran publik
5. Pengalihan pos-pos anggaran ke sektor yang lebih mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi.
6. Mengekang utang publik dengan membatasi penerbitan obligasi sebesar 30 trilyun yen pada tahun 2001-2002
7. Menghilangkan praktek dana alokasi khusus pada pajak pendapatan khusus (pajak minyak, gas dan kendaraan berat) untuk proyek tertentu (pembangunan jalan)
8. Deregulasi ekonomi Jepang untuk membantu pertumbuhan industri baru disisi lain, tidak semua rencana Koizumi berjalan. Beberapa kebijakan-kebijakannya malah mandek tinggal rekomendasi semata. rancangan-rancangan kebijakan ini adalah:
9. Tidak ada strategi komprehensif dalam terhadap deflasi yang telah terjadi
10. Sumber pendapatan bukan pajak telah digunakan untuk mendukung anggaran belanja
11. Menjaga batasan tertinggi pinjaman sebesar 30 trilliyun Yen pada Obligasi Nasional terbitan terbaru ternyata sangat terbatas pada
12. Tidak ada pengurangan yang berarti pada anggaran keuangan
13. Pembedaan antara pajak jalanan sampai pada pajak konstruksi dan pemeliharaan tetap berlanjut.
14. Belum ada kemajuan yang nampak dalam pembukaan lapangan pekerjaan dan pembentukan industri baru melalu deregulasi undang-undang ekonomi
15. Reformasi keamanan sosial jauh dari yang di harapkan para ekonomikus
16. Sebagian besar dana terbuang untuk menghilangkan pengeluaran pada kerangka kerja yang kaku dan pengeluaran langsung untuk kenomi yang lebih efisien
17. Gagalnya privatisasi Perusahaan Pos karena ketidaksetujuannya Majelis Rendah
18. Dana suplemen keuangan pada tahun 2001, paket anti deflasi pada bulan Februari-Maret 2002 dan paket revitalisasi ekonomi bulan Juni 2002 yang berakhir tidak lebih dari paket stimulan ekonomi.

Tetapi selama kurang lebih setahun berkuasa Koizumi, sedikit banyak tujuan reformasinya berubah. Perubahan ini berkaitan erat dengan kuat dan kakunya birokrasi. belum lagi ditambah dengan perselisihannya dengan sesama faksi LDP atau lebih tepatnya faksi konservatif LDP yang mengakar sampai jajaran birokrasi, legislatif dan kelompok berkepentingan atau yang sering disebut segitiga besi. Beberapa bentuk perubahan reformasinya adalah

1. Konsolidasi keuangan moderat berupa potongan 1,7% pada tahun 2002 untuk dana Akun General.
2. Potongan pendanaan sebesar 10% untuk proyek Pekerjaan Umum ditahun 2002

3. Pengalihan pendanaa sejumlah besar pekerjaan umum ketujuh area prioritas struktural reformasi dan untuk efisiensi alokasi belanja
4. Mengurangi subsidi pemerintah untuk perusahaan publik sebesar 10% atau 1 triliun yen.
5. Membebaskan sejumlah jalan untuk menambah jumlah pendapatan umum
6. Nominal observasi atas penerbitan obligasi tahunan pemerintah sebesar 30 triliun Yen
7. Mempercepat penyelesaian kredit macet bank-bank
8. Beberapa perubahan dalam aturan kesehatan seerti pemotongan tunjangan dokter, menurunkan harga obat-obatan, dan meningkatkan bayaran tenaga medis tidak tetap dan meningkatkan premi asuransi kesehatan.

Dari semua poin kebijakan yang berhasil, berubah dan gagal, dapat terlihat bahwa Perdana menteri berusaha sekeras mungkin untuk menghemat APBN dengan memotong anggaran sebanyak yang mungkin bisa didapat. cara inilah yang kemudian menuai banyak kritikan dan tentangan dari baik itu faksi dari LDP sendiri, birokrasi maupun legislatif.

Pada tahun pertama Jepang berada dibawah Perdana Menteri Koizumi, banyak yang pesimis dengan pemerintahan Koizumi. Perdana menteri ini terkesan dianggap “*Underdog*” atau tidak mampu melaksanakan segala rencana reformasinya. Karena tindakannya yang ingin menyenangkan semua pihak, maka banyak yang melihatnya sebagai Perdana Menteri boneka atas kegiatan tahunannya yang mengunjungi Kuil Yasukuni yang notabeneanya adalah simbol konservatisme di Jepang. Namun dari komentar-komentar miring ini tidak ada yang berusaha melihatnya dari sisi lain, yang mana sebenarnya ini adalah langkah taktisnya untuk membujuk golongan politikus konservatis agar menyetujui kebijakan-kebijakan reformisnya.

Karena bila melihat kondisi politik Jepang, golongan politikus konservatif sangat kuat. Kaum konservatif membentuk sebuah sistem tersendiri untuk menjaga kekuasaannya. Sistem inilah yang lebih tepatnya yang menjadi penghambat Koizumi untuk mewujudkan ambisi reformasinya, yaitu sebuah sistem pembuatan kebijakan. Sistem ini terbilang cukup tradisional karena terbentuk pada saat partai berkuasa ditahun 1955. Sistem kebijakan tradisional merupakan sebuah lembaga berstruktur ganda yang terdiri dari LDP sebagai partai yang berkuasa dan birokrasi, kedua lembaga ini dikuasai oleh kaum konservatif. Didalam sistem ini pihak eksekutif, dalam hal ini Perdana Menteri dan kabinet, berada pada posisi subordinat alih-alih superordinat sehingga menghambat kinerja Perdana Menteri dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakannya terutama yang berkaitan dengan reformasi yang sedang dijalankan.

Para oposisinya membentuk sebuah koalisi anti reformasi yang berpusat pada struktur pembuatan kebijakan kolot ini dengan beranggotakan para pelaku industri dan kontraktor yang bertujuan untu menghambat pemusatan anggaran pada kepentingan reformasi struktural. Seiring berjalannya waktu, reformasi yang pada awalnya disambut positif lama-kelamaan menjadi negatif serta membuat kondisi politik Jepang semakin tidak memungkinkan untuk melaksanakan reformasi struktural. Pada akhirnya jalan untuk menuju reformasi semakin berbatu sehingga waktu yang dibutuhkan reformasi semakin lama dan mengakibatkan kegagalan terlaksananya reformasi sesuai yang diimpikan oleh Koizumi.

## **KESIMPULAN**

Periode stagnansi ekonomi selama hampir tiga decade membutuhkan penanganan secepatnya. hasil pemilu Bulan 24 April 2001, menunjuk seorang perdana menteri yang ke-85 Koi-

zumi Jun'ichiro. Dengan harapan dapat mereformasi Jepang secara struktural untuk mendobrak perekonomian menjadi lebih baik. Reformasi ini berakhir dengan sebuah kegagalan. Jepang belum siap reformasi saat itu. Pemerintah menginginkan Jepang memiliki perekonomian yang sehat terlebih dahulu lalu jalankan reformasi. Koizumi sebagai pengagas menghendaki hal lain, satu generasi harus berkorban, menderita dengan keadaan yang serba kekurangan. Tak ada jaminan bahwa reformasi ini dapat berjalan mulus dan sebuah "fail safe" apabila reformasi ini gagal, hanya sebuah keyakinan. Selama dua tahun masa jabatannya rancangan reformasi ini terus berubah dan berakhir dengan kegagalan.

#### DAFTAR PUSTAKA

1994. *Japan: Profile of A Nation*. Tokyo : Kodansha.

Koichi, Kishimoto. 1997. *Politics in Modern Japan*. Tokyo: Japan Echo.

2001. "Koizumi Favorit Ganti Mori." Jakarta: Kompas, April 17.

Mulgan, Aurelia George. 2002. *Japan's Failed Revolution*. Canberra: Anu E Press.

Stockwin, J.A.A. 2005. *Dictionary of The Modern Politics of Japan*. London: Routledge Curzon.

#### CATATAN AKHIR

1. Dalam bahasa inggris partai ini bernama *Liberal Democratic Party*, dalam bahasa Jepang bernama Jiyuu Minshutou (自由民主党) atau sering disingkat Jimintou. Dalam semua literatur yang dipakai penulis baik (berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia) untuk menyusun jurnal ini semua memakai LDP untuk menyebut partai ini
2. Undang-undang pemilu dibawah konstitusi Meiji yang saat itu baru disahkan, yang mana undang-undang ini membatasi pemilih terbatas pada golongan konlomerasi dan golongan bekas samurai saja. Dimana golongan inilah mempunyai kepentingan besar terhadap negara dan mengetahui seluk-beluk Jepang saat itu.
3. Ini adalah gerakan yang diprakarsai oleh Itagaki Keisuke pada tahun 1925. Itagaki Keisuke yang terpengaruh oleh ideology demokrasi ala barat merasa perlu adanya blocking kekuasaan kaum samurai yang saat itu masih mendominasi politik Jepang sekaligus jengah dengan perebutan kekuasaan antara klan Chosu dan klan Satsuma sebagai pemenang Restorasi Meiji
4. Langkah yang cukup ambisius dan terkesan tergesa-gesa, mengingat dia hanya memiliki waktu yang sedikit dan massifnya permasalahan yang dihadapi oleh koizumi serta tinggi ekspektasi yang diharapkan masyarakat Jepang saat itu